

IMPLEMENTASI HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS)

Title	IMPLEMENTASI HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS)
Author Order	3 of 3
Accreditation	
Abstract	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional dan faktor-faktor yang cenderung berpengaruh dalam implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan analisis yuridis sosiologis serta spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Penentuan informan penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Pengolahan data menggunakan metode reduksi data, display data dan kategorisasi data, kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan matrik data kualitatif serta dianalisis dengan model analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas belum terimplementasi sepenuhnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 3 (tiga) parameter meliputi : baiknya implementasi pengawasan keamanan pelayanan kesehatan tradisional, belum optimalnya implementasi pengawasan legalitas pelayanan kesehatan tradisional, dan baiknya implementasi pengawasan laporan pelayanan kesehatan tradisional kepada Dinas Kesehatan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berupa adanya peraturan perundang-undangan; tersedianya tenaga pengawas; adanya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengakomodir pelayanan perizinan pengawasan dan menjalin hubungan dengan asosiasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional; tersedianya sarana dan prasarana; terdapat kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadap pengembangan asuhan mandiri tanaman obat keluarga; kedisiplinan Dinas Kesehatan dalam mengecek laporan pelayanan kesehatan tradisional. Faktor penghambat berupa tidak adanya SOP atau prosedur yang baku untuk mengatur apabila menemukan penyimpangan dan tindakan hukum atau sanksi yang belum begitu tegas; tidak pahamnya programmer di Puskesmas terhadap peraturan yang berlaku; belum terlaksananya sosialisasi lintas sektorat; belum semua Penyehat Tradisional tersosialisasi dengan adanya STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional); kurangnya anggaran Puskesmas untuk mendukung peningkatan program pelayanan kesehatan; pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan untuk menyesuaikan fasilitas; adanya kendala Penyehat Tradisional dalam mengurus perizinan; banyaknya pelayanan kesehatan tradisional yang belum terdaftar; banyaknya layanan kesehatan tradisional yang melanggar peraturan perundang-undangan; rendahnya kedisiplinan pelayanan kesehatan tradisional dalam mengurus pendaftaran. Kata Kunci : Implementasi Hukum; Pelayanan Kesehatan Tradisional; Pengawasan.</p>
Publisher Name	Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman
Publish Date	2023-02-12
Publish Year	2023
Doi	DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.1370
Citation	
Source	Soedirman Law Review
Source Issue	Vol 5, No 1 (2023)
Source Page	
Url	http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/1370/213
Author	NURANI AJENG TRI UTAMI, S.H., M.H